

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA
DALAM MENANGGULANGI *COVID-19*
(Studi Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)**

(Tesis)

Oleh

DEFITA SELVIANI



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN TACKLING COVID-19 (STUDY OF BOGA BUILDING VILLAGE, WAY SERDANG DISTRICT, MESUJI REGENCY)

By

DEFITA SELVIANI

This research is to find out and analyze the implementation of the village fund management system in an effort to win over the *COVID-19* pandemic in terms of human resources in Gedung Boga Village, Way Serdang District, Mesuji Regency. The type of research used in this study is descriptive research with qualitative methods. Data analysis uses data reduction, data presentation and then using inference techniques. Data collection techniques using interviews. The research informants are village officials, food buildings, and employees of way serdang sub-district. Results of the study Judging from human resources, the level of ability of implementers is very good because the village government is able to manage and implement village programs against *covid-19* and village fund BLT programs evenly and does not cause social jealousy. The budget resources provided are sufficient to finance the program with details of purchasing masks, disinfectant liquids, laser thermometers, *hand sanitizers*, PPE suits, gallon faucets, and village fund BLT and other equipment expenditures.

Keywords: Implementation, Village Fund, Resources

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENANGGULANGI COVID-19 (STUDI DESA GEDUNG BOGA KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI)

Oleh

DEFITA SELVIANI

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis implementasi sistem pengelolaan dana desa dalam upaya menanggulangi pandemi *covid-19* dilihat dari aspek sumber daya manusia di Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data lalu menggunakan teknik penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Informan penelitian adalah perangkat desa gedung boga dan pegawai kecamatan way serdang. Hasil dari penelitian Dilihat dari sumber daya manusia tingkat kemampuan pelaksana sangat baik karena pemerintah desa mampu memajemen dan mengimplementasikan program desa lawan *covid-19* dan program BLT dana desa dengan rata dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial.. Sumber daya anggaran yang disediakan sudah cukup untuk membiayai program dengan rincian pembelian masker, cairan desinfektan, laser thermometer, *handsanitizer*, baju APD, kran gallon, dan BLT dana desa dan belanja perlengkapan lainnya.

Kata Kunci: Implementasi, Dana Desa, Sumber Daya

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA
DALAM MENANGGULANGI *COVID-19*
(Studi Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)**

Oleh

DEFITA SELVIANI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER SAINS**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Tesis : **IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA
DALAM MENANGGULANGI COVID-19
(Studi Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang
Kabupaten Mesuji)**

Nama Mahasiswa : **Defita Selviani**

No.Pokok Mahasiswa : 1926061002

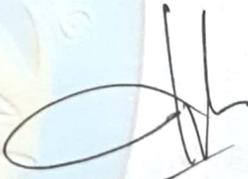
Jurusan : Magister Ilmu Administrasi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI
Komisi Pembimbing

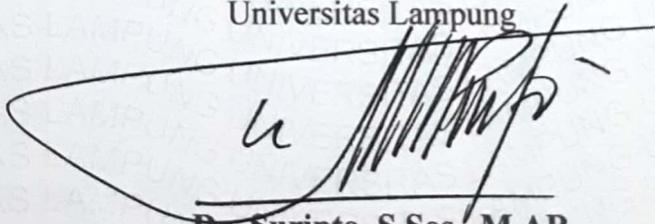


Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si
NIP. 197507202003121002



Dr. Nur Efendi, S.Sos., M.Si
NIP. 196910121995121001

Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung



Dr. Suropto, S.Sos., M.AB
NIP. 196902261999031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si



Sekretaris : Dr. Nur Efendi, S. Sos., M.Si.



Penguji Utama : Dr. Suripto, S.Sos., M.AB.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Ida Nurhaida, M.Si
NIP. 196108071987032001



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 21 Juni 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 21 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,


Defita Selviani
NPM. 1926061002

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan pada tanggal 23 Desember 1995 di Bukoposo, Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. Penulis adalah anak pertama dari 2 bersaudara, lahir dan dibesarkan dari pasangan Iwan M Dahari dan Suwanti. Dalam proses keseharian penulis ditanamkan dengan kasih sayang untuk tetap sabar, tenang dalam keadaan apapun, selalu bertaqwa kepada Allah SWT.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak Kartika Jaya (Bekasi) pada Tahun 2000-2001. Pendidikan sekolah dasar penulis tempuh di SDN 01 Cikiwul (Bekasi) pada Tahun 2001-2003 kemudian melanjutkan ke SDN 01 Bukoposo pada Tahun 2003-2007. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama penulis tempuh di SMPN 01 Way Serdang pada Tahun 2007-2010. Pendidikan Sekolah Menengah Atas penulis tempuh di SMAN 10 Bandar Lampung pada Tahun 2010-2013. Pada tahun 2013, penulis terdaftar sebagai Mahasiswi Universitas Lampung pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan studi Pascasarjana di FISIP Universitas Lampung Jurusan Magister Ilmu Administrasi.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan Menyebut Nama Allah...
Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:*

*Ibuku tercinta Suwanti, Ayahku terhebat Iwan M Dahari dan Adik
ku Decky Octa Praka Yudha yang selalu berjuang keras tanpa lelah
untuk memberikan yang terbaik kepadaku serta selalu mendoakanku
dalam setiap sujudnya.*

*Terimakasih atas segala pengorbanan, cinta-kasih, keikhlasan,
ketulusan, kesabaran dan doa dalam menanti keberhasilanku.*

*Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan kepadaku, semoga
kelak dapat sukses dan menjadi kebanggaan sedarah dalam garis
keturunan.*

Para Pendidik dan Almamater Tercinta...

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

(Ali Bin Abi Thalib)

“Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik”

(Ali Bin Abi Thalib)

SANWACANA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas segala limpahan rahmat, karunia dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Menanggulangi Covid-19 Tahun 2020 (Studi Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)”**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Pascasarjana (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih secara khusus kepada ayah dan ibu tercinta yang tidak pernah lupa memberikan doa dan restunya, dukungan moril dan spiritual serta harapan dan kasih sayangnya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pihak pembaca yang arif guna tugas selanjutnya di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung atas bantuannya dalam proses penyelesaian tesis ini.
2. Dr. Suropto, S.Sos., M.AB selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi, terima kasih atas arahan serta dukungan morilnya.
3. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si selaku dosen pembimbing akademik (PA) yang turut membantu memberi kemudahan dan motivasi kepada penulis selama kuliah.
4. Dr. Nur Efendi, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberi arahan, saran dan nasihat sehingga penulis dapat memperbaiki dan menyelesaikan tesis ini.
5. Segenap civitas akademika, atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan serta para karyawan atas segala bantuan yang telah diberikan.
6. Segenap responden dalam penelitian ini: Terima kasih atas bantuan, dukungan serta keramahan yang diberikan kepada penulis.
7. Ayah (**Iwan M Dahari**) dan Ibu (**Suwanti**) tercinta, semoga ini menjadi awal yang indah sekaligus batu loncatan bagi penulis untuk dapat membahagiakan ayah dan ibu dikemudian hari. Semoga dengan keimanan untuk terus berikhtiar, kerja keras untuk terus berupaya, tawakal untuk berserah diri kepada Allah SWT serta doa dan dukungan dari ayah dan ibu menjadikan penulis mendapatkan kesuksesan dalam rencana hidupnya demi memberikan manfaat yang baik bagi negara, agama dan keluarga.
Aamiin Ya Allah Ya Rabbalalaamiin

8. Adik ku Decky Octa Praka Yudha yang telah menjadi motivasi dan semangat bagi penulis, semoga kelak dengan kesuksesan kita dapat membahagiakan kedua orang tua kita dengan tujuan yang luhur serta mendapat keberkahan dari Allah SWT dalam meraih kesuksesan. Aamiin Ya Rabbal' alamin.
9. Keluarga Besar **Magister Ilmu Administrasi 2019: Mbak Mira, Mbak Muslimah, Mbak Neti, Meri, Anggun, Mike, Iranda, Sasa, Vera, Erma, Yudha, Lovi, Dini, Imas, Iswanto, Wiryawan, Ibnu, Olaf.** Terimakasih telah menjadi keluarga seperjuangan diperkuliahan. Semoga kita sukses dan berguna bagi nusa-bangsa dan keluarga. Aamiin Ya Rabbal' alamin.
10. Untuk keluarga besarku terima kasih atas doa, dukungan serta bantuannya selama ini baik yang penulis sadari maupun yang tidak disadari. Semoga kelak penulis dapat membalasnya minimal dengan kebanggaan atas kesuksesan penulis sebagai manusia yang se-darah dalam garis keturunan.
11. Beserta seluruh pihak yang terkait dan telah memberikan kontribusi dalam penyusunan tesis ini yang tidak bisa dituliskan satu per satu.

Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT dan penulis meminta maaf apabila ada kesalahan tanpa sengaja dan yang pernah tersakiti dalam kehidupan penulis. Semoga tesis ini bermanfaat. Jazzakallah Khairan Katsir.

Bandar Lampung, 21 Juni 2023

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR SINGKATAN	
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik	9
2.1.1 Definisi Kebijakan Publik	9
2.2 Tahapan Penyusunan Kebijakan Publik.....	10
2.2.1 Tahap Penyusunan Agenda.....	10
2.2.2 Tahap Formulasi Kebijakan	11
2.2.3 Tahap Adopsi Kebijakan.....	13
2.2.4 Tahap Implementasi Kebijakan	14
2.2.4.1 Unsur-unsur Implementasi Kebijakan	15
2.2.5 Tahap Evaluasi Kebijakan	17
2.3 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik.....	18
2.3.1 Model Implementasi Kebijakan Publik	18
2.3.1.1 Model Implementasi Mazmanian dan Sabatier.....	18
2.3.1.2 Model Implementasi Edward III.....	20
2.3.1.3 Model Implementasi Merilee Grindle.....	22
2.3.2 Aktor Implementasi Kebijakan	23
2.3.3 Fator Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.....	24
2.3.4 Kerangka Pikir	26
III. METODE PENELITIAN	27
3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian	27
3.2 Fokus Penelitian	28
3.3 Lokasi Penelitian	28
3.4 Jenis dan Sumber Data	29
3.4.1 Jenis Data	29
3.4.2 Sumber Data	29
3.5 Teknik Analisis Data.....	30

3.5.1 Reduksi Data	30
3.5.2 Penyajian Data.....	30
3.5.3 Penarikan Kesimpulan.....	31
3.6 Teknik Keabsahan Data	31
3.6.1 Triangulasi.....	31
3.6.2 Kebergantungan	31
3.6.3 Kepastian Data	32
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Mesuji.....	33
4.1.1 Sejarah Kabupaten Mesuji	33
4.1.2 Peta Kabupaten Mesuji	33
4.1.3 Batas Wilayah Kabupaten	34
4.1.4 Luas Wilayah dan Rasio Terhadap Total Kab. Mesuji	34
4.1.5 Jumlah Penduduk	35
4.1.6 Pendidikan.....	35
4.1.7 Keagamaan.....	36
4.1.8 Keadaan Ekonomi	37
4.1.9 Aspek Pemerintahan.....	38
4.2 Gambaran Umum Desa Gedung Boga.....	39
4.2.1 Sejarah Desa.....	39
4.2.2 Batas Wilayah	40
4.2.3 Luas Wilayah Desa	40
4.2.4 Jumlah Penduduk	40
4.2.5 Keagamaan.....	41
4.2.6 Keadaan Ekonomi	41
4.3 Hasil dan Pembahasan.....	43
4.3.1. Kondisi Daerah Mesuji	43
4.3.2. Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Menanggulangi <i>Covid-19</i> Tahun 2020 di Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji melalui perspektif George Edward III pada aspek sumber daya	45
5 Kesimpulan dan Saran	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perubahan Regulasi Prioritas Dana Desa.....	2
Tabel 2. Jumlah Penerima BLT Dana Desa Gedung Boga.....	5
Tabel 3. Perubahan Anggaran Bidang Penanggulangan Bencana 2020	6
Tabel 4. Luas Wilayah, Rasio Terhadap Total dan Jumlah Desa	32
Tabel 5. Jumlah Penduduk Kabupaten Mesuji.....	33
Tabel 6. Jumlah SD, SMP dan SMA Menurut Kecamatan Tahun 2023.....	33
Tabel 7. Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan Tahun 2023	34
Tabel 8. Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman Tahun 2023	35
Tabel 9. Program Transmograsi Lokal.....	37
Tabel 10. Nama Kepala Desa Gedung Boga dan Masa Bakti.....	37
Tabel 11. Peruntukan Lahan Desa Gedung Boga	38
Tabel 12. Jumlah Penduduk Desa Gedung Boga.....	38
Tabel 13. Daftar Pemeluk Agama Desa Gedung Boga.....	39
Tabel 14. Data Bangunan Tempat Ibadah Desa Gedung Boga.....	39
Tabel 15. Luas Pemanfaatan Lahan Pertanian	39
Tabel 16. Jumlah Peliharaan Ternak.....	40
Tabel 17. Struktur Mata Pencaharian.....	40
Tabel 18. Data Informan Penelitian	27
Tabel 19. Kesimpulan Indikator Informasi	40
Tabel 20. Kesimpulan Indikator Staf	40
Tabel 21. Kesimpulan Indikator Wewenang.....	40
Tabel 22. Kesimpulan Fasilitas	40

DAFTAR SINGKATAN

1. WHO = World Health Organization
2. PerMendes PDTT = Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
3. APBN = Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
5. BLT = Bantuan Langsung Tunai
6. Covid-19 = Corona Virus Disease 2019
7. ODP = Orang Dalam Pantauan
8. PDP = Pasien Dalam Pengawasan
9. RPJMDes = Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
10. RKPDes = Rencana Kerja Pemerintah Desa
11. APBDes = Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada awal Tahun 2020 dunia dikejutkan dengan kejadian yang belum diketahui penyebabnya. Kejadian ini bermula dari laporan Negara Cina kepada *World Health Organization* (WHO) tentang pasien yang menderita penyakit *pneumonia* akut sebanyak 44 orang di Kota Wuhan Provinsi Hubei China pada akhir Tahun 2019 lalu (Handayani, 2020). Pada akhir bulan Januari 2020 WHO menetapkan status *global emergency* pada kasus virus *corona*, kemudian pada tanggal 11 Februari 2020 WHO menamakan sebagai *Corona Virus Diseases-19 (Covid-19)*. Virus ini telah menyebar hingga ke 190 negara termasuk Indonesia, bahkan Indonesia melaporkan kasus pertama pada 2 Maret 2020 dengan dugaan pasien tertular dari orang asing yang berkunjung ke Indonesia (Susilo et al., 2020).

Infeksi *covid-19* merupakan suatu pandemi global dengan penyebaran melalui interaksi manusia yang sangat cepat dan serius terhadap perekonomian dan kesehatan masyarakat, maka dari itu pemerintah Indonesia dengan tanggap melakukan berbagai upaya untuk pencegahan dan penanganan *covid-19*. Dampak dari pandemi *covid-19* tidak hanya terjadi pada kehidupan sosial, tetapi berdampak cukup signifikan juga terhadap perekonomian masyarakat dari berbagai sudut salah satunya perekonomian masyarakat desa. Contoh masyarakat desa yang terkena dampak *covid-19* yaitu pekerja buruh yang terpaksa mengalami pemutusan hubungan kerja dan harus kembali ke desa serta pedagang kecil yang merugi karena usahanya gulung tikar sehingga pendapatan masyarakat cenderung menurun. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan kepada pemerintah desa untuk mengelola pemerintahan dan sumber daya alam yang dimiliki termasuk mengelola keuangan dan kekayaan milik desa. oleh karena itu pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengelola pendapatan asli desa dan pendapatan transfer berupa Alokasi Dana Desa.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa merupakan alokasi anggaran *on budget* yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak *covid-19* ditingkat desa. (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2020)

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia diketahui bahwa penggunaan dana desa harus sesuai dengan apa yang menjadi prioritas dan telah ditetapkan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Penggunaan dana desa diprioritaskan. Pada masa pandemi *covid-19* terjadi perubahan tatanan prioritas anggaran dana desa untuk tahun 2020 yang sudah diputuskan pada tahun 2019, perubahan yang mewajibkan pemerintah desa untuk mengubah rencana anggaran terutama untuk penanganan wabah *covid-19* yang sesuai dengan arahan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Upaya yang dilakukan oleh Menteri Desa PDTT adalah mengeluarkan regulasi untuk menciptakan desa tanggap *covid-19* serta meningkatkan daya beli masyarakat desa di masa pandemi dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa serta tercantum dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Tabel 1 Perubahan Regulasi Prioritas Dana Desa

Bidang	Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019	Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020
Pembangunan Desa	Ya	Ya
Pembinaan Kemasyarakatan	Ya	Ya
Pemberdayaan Masyarakat	Ya	Ya
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Tidak	Ya

Sumber: Peraturan Menteri Desa PDTT

Merujuk pada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020, pandemi *covid-19* merupakan bencana non alam yang bisa ditanggulangi dengan menggunakan dana desa pada kategori penanggulangan bencana, darurat dan mendesak. Salah satu bentuk upaya pencegahan *covid-19* adalah membentuk relawan desa lawan *covid-19*, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan informasi terkait *covid-19*, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
- b. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya;
- c. Mengidentifikasi fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
- d. Melakukan penyemprotan desinfektan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) ditempat umum;
- e. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *covid-19*;
- f. Menyediakan informasi penting terkait penanganan *covid-19* seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, ambulans, dan lain-lain;
- g. Melakukan deteksi dini penyebaran virus *covid-19* dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 1. Pencatatan tamu yang masuk ke desa;
 2. Pencatatan keluar masuk warga desa setempat ke daerah lain;
 3. Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar;
 4. Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) *covid-19*;
- h. Mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa 24 jam;
- i. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan masa;

Pemerintah pusat juga berupaya meningkatkan daya beli masyarakat desa di masa pandemi dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari dana desa dan tercantum dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020.

Metode dan mekanisme penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT dana desa mengikuti rumus:

- a. Desa penerima dana desa kurang dari Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) mengalokasikan BLT dana desa sebesar 25% dari jumlah dana desa;
- b. Desa penerima dana desa sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000.000 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) mengalokasikan BLT dana desa sebesar 30% dari jumlah dana desa;
- c. Desa penerima dana desa lebih dari Rp. 1.200.000.000 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) mengalokasikan BLT dana desa sebesar 35% dari jumlah dana desa;
- d. Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang di alokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Sasaran penerima BLT dana desa adalah keluarga miskin non program keluarga harapan atau bantuan pangan non tunai melainkan masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (*exclusion error*) dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT dana desa adalah:

- a. Masa penyaluran dana desa 9 (sembilan) bulan terhitung sejak April 2020;
- b. Besaran BLT dana desa perbulan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, Juni);
- c. Besaran BLT dana desa perbulan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan kedua-ketiga (Juli-Desember);
- d. BLT dana desa sebagaimana dimaksud pada poin 4 (empat) dapat disalurkan sepanjang dana desa Tahun 2020 masih tersedia;

Menindaklanjuti regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Desa PDTT maka pemerintah desa juga wajib melaksanakan program yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat yaitu membentuk desa tanggap

covid-19 dan menyalurkan BLT dana desa bagi masyarakat miskin di setiap daerahnya tanpa terkecuali, termasuk desa yang berada di Kabupaten Mesuji khususnya Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang.

Tabel 2 Jumlah Penerima BLT Dana Desa Gedung Boga

Nama Dusun	Tahap I	Tahap II	Tahap III
Bakti	19	25	6
Delta	15	20	6
Dewa Tanjung	24	28	8
Kedung Rejo	11	14	5
Murni	12	16	6
Pelita	18	25	7
Sri Bakti	14	18	5
Tanjung Sari	21	26	7

Sumber: Surat Keputusan Kepala Desa Gedung Boga tentang Penetapan Penerima BLT

Anggaran tersebut disalurkan kepada 135 jiwa dengan rincian senilai Rp. 600.000,- untuk 3 bulan pertama dan 172 jiwa dengan nilai Rp. 300.000,- untuk 3 bulan kedua serta senilai Rp. 300.000,- untuk 50 jiwa dalam 3 bulan terakhir. Dalam penetapan penerima BLT dana desa terlebih dahulu dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah desa, yang nantinya segala keputusan yang telah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) lalu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Terbitnya peraturan dari pemerintah pusat tentang pencegahan *covid-19* maka pemerintah desa juga harus mengimplementasikan aturan tersebut dengan optimal. Pemerintah desa menjadi pemeran utama untuk memutus rantai *covid-19* serta menjadi garda depan untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat sehingga keberhasilan yang diraih desa bisa dijadikan contoh pengalaman yang lebih besar lagi.

Desa Gedung Boga menjadi salah satu desa yang ikut merubah alokasi anggaran yang mulanya digunakan untuk prioritas pembangunan dan pemberdayaan desa tetapi karena adanya *covid-19* terpaksa harus mengalihkan anggarannya untuk penanggulangan *covid-19*. Pemerintah Desa Gedung Boga juga telah menetapkan besaran alokasi dana desa untuk penanganan *covid-19* dengan total nilai sebesar Rp 506.715.759 dengan rincian sebesar Rp. 63.915.759,- digunakan untuk program desa lawan *covid-19*, kemudian sebesar Rp. 422.800.000,- digunakan untuk penyaluran BLT dana desa selama 9 (sembilan) bulan dalam setahun.

Tabel 3 Perubahan Anggaran Bidang Penanggulangan Bencana Tahun 2020

Keterangan	Perubahan	
	Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019	Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020
Pagu	Rp. 961.146.000,-	Rp. 950.339.000,-
Anggaran	Rp. 0,-	Rp. 506.715.759,-

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gedung Boga Tahun 2020.

Besarnya jumlah anggaran yang diberikan kepada pemerintah desa maka semakin besar pula tanggungjawabnya dalam mengelola keuangan desa. Terutama kepala desa selaku penanggungjawab atas keuangan desa harus bisa melaksanakan tugas dengan baik dan benar, maka dari itu pemerintah desa wajib membuat laporan atas realisasi pelaksanaan APBDes serta laporan pertanggungjawaban atas realisasi APBDes. Penyusunan laporan ini berdasarkan siklus pengelolaan keuangan desa yaitu mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan sampai pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa.

Mengingat kepala desa memiliki tanggungjawab yang besar atas tugas ini maka dirasa perlu melibatkan unsur masyarakat agar tercipta transparansi dalam mengelola keuangan desa. Masyarakat yang dilibatkan dalam hal ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar ikut serta dalam tahap perencanaan dan penganggaran, sehingga program kerja yang disusun dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat dan disesuaikan dengan anggaran yang ada di desa.

Selain itu pemerintah desa juga tetap harus melakukan pencatatan atas semua transaksi keuangan sebagai upaya pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Pengelolaan keuangan akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh sumber daya yang memadai terutama sumber daya manusia, baik dari segi kualitas ataupun kuantitas. Bukan hanya kepala desa saja yang bertanggungjawab penuh sebagai pengguna anggaran tetapi seluruh perangkat desa juga memiliki peran masing-masing dalam mengelola keuangan desa, keduanya harus memahami peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain mengenai pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan sudah diatur secara jelas melalui peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan (korupsi), maka dari itu pemerintah desa harus betul-betul memahami aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan Desa Gedung Boga sudah mengimplementasi pengelolaan dana desa dengan sangat baik, dimana bidang pembangunan desa dan bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa sudah terealisasi. Sementara pada bidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat memang dialihkan untuk membiayai penanganan *covid-19*, sehingga 2 bidang ini tidak memiliki anggaran. Kemudian dalam pengelolaan bidang pembangunan dilakukan dengan cara swakelola serta secara transparan mengenai anggaran, oleh karena itu mekanisme pelaksanaan pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain ada pemerintah desa yang harus memahami tugas pokoknya, ada pemerintah kabupaten yang ikut membantu dalam proses pendampingan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan analisis keberhasilan implementasi pengelolaan dana desa dilihat dari aspek sumber daya dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Dalam Menanggulangi Covid-19 (Studi Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

Bagaimanakah implementasi sistem pengelolaan dana desa dalam upaya menanggulangi pandemi *covid-19* dilihat dari aspek sumber daya di Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan menganalisis implemetasi sistem pengelolaan dana desa dalam upaya menanggulangi pandemi *covid-19* dilihat dari aspek sumber daya di Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Dilihat dari konteks pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Kebijakan Publik terkait implementasi kebijakan pengelolaan dana desa serta membantu pemerintah mengawasi prosesnya agar berjalan sesuai dengan tujuan.

2. Secara Praktis

Dilihat dari sudut pandang praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan informasi bagi pemerintah dalam upaya menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran dengan meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan strategis di desa melalui musyawarah desa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

2.1.1 Definisi Kebijakan Publik

Dalam ilmu politik, kebijakan publik merupakan hal yang sangat menarik. Walaupun studi terhadap kebijakan publik lebih ditekankan mengenai administrasi negara, tetapi kebijakan publik dianggap sebagai proses pembuatan kebijakan publik yang dilakukan oleh negara dengan mempertimbangkan pada aspek tertentu. Kebijakan publik menurut Frederich adalah upaya yang berhubungan dengan usaha untuk mencapai beberapa tujuan, meskipun maksud dan tujuan dari pemerintah tidak selalu mudah untuk dicapai. Sedangkan menurut Eualau dan Prewitt kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan mematuhi keputusan tersebut. (Aziz, 2019)

Lasswell menyatakan bahwa kebijakan adalah sebuah keputusan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang (pemerintah) untuk diikuti dan dipatuhi serta dapat memengaruhi banyak orang dalam setiap keputusan dan tindakannya guna memecahkan permasalahan tertentu ditengah masyarakat. (Aras, 2018)

Selain itu, James Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah meskipun kebijakan tersebut dapat dipengaruhi para aktor dan faktor dari luar, sedangkan kata “publik” secara terminologi mengandung arti sekelompok orang atau masyarakat. (Subandi, 2017)

Berdasarkan definisi menurut beberapa ahli, dalam penelitian ini penulis mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik dengan mempertimbangkan beberapa aspek termasuk dampak yang akan terjadi akibat kebijakan publik.

2.2. Tahapan Penyusunan Kebijakan Publik

Menurut William Dunn, untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dibutuhkan suatu analisis untuk sebuah kebijakan, karena masalah merupakan bagian dari alternatif kebijakan. Dunn mengungkapkan ada beberapa tahapan dalam penyusunan kebijakan publik, yaitu penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan yang terakhir evaluasi kebijakan.

2.2.1. Tahap Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Pada tahap awal penyusunan sebuah kebijakan publik, hal yang dilakukan adalah menentukan masalah/isu publik apa yang akan di selesaikan. Tidak semua masalah akan menjadi masalah publik, tidak semua masalah menjadi isu dan tidak semua isu menjadi agenda pemerintah. Pada hakikatnya permasalahan ditemukan melalui proses *problem structuring*, dimana isu kebijakan dapat berkembang menjadi agenda kebijakan, dengan syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki efek yang besar terhadap kepentingan masyarakat;
- b. Membuat analog dengan cara memancing kebijakan publik yang pernah dilakukan;
- c. Isu tersebut mampu dikaitkan dengan simbol-simbol nasional/politik yang ada;
- d. Terjadinya kegagalan pasar (*market failure*);
- e. Tersedianya teknologi dan dana untuk menyelesaikan masalah publik;

Masalah kebijakan publik merupakan kebutuhan, nilai-nilai atau kesempatan yang tidak terealisasi tetapi yang dicapai melalui tindakan publik. Adapun ciri-ciri masalah kebijakan meliputi:

1. Saling ketergantungan dari masalah kebijakan, dalam arti masalah kebijakan dalam satu bidang dapat mempengaruhi masalah kebijakan di bidang lain.
2. Subyektivitas dari masalah kebijakan, artinya bahwa masalah kebijakan adalah suatu hasil pemikiran yang dibuat pada suatu lingkungan tertentu.
3. Masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginan untuk mengubah beberapa situasi masalah, masalah kebijakan merupakan hasil penilaian subyektif manusia.
4. Masalah dan solusi berada dalam perubahan-perubahan yang konsisten dan karenanya masalah tidak secara konstan terpecahkan, solusi terhadap masalah dapat menjadi usang meskipun masalah sendiri belum usang.

Keberhasilan dalam memecahkan suatu masalah memerlukan penemuan solusi yang tepat. Selanjutnya, Dunn mengemukakan bahwa *problem structuring* memiliki empat fase sebagai berikut:

1. Pencarian masalah (*problem search*);
2. Pendefinisian masalah (*problem definition*);
3. Spesifikasi masalah (*problem specification*);
4. Pengenalan masalah (*problem setting*);

Setelah menentukan masalah yang akan diselesaikan, para pejabat yang dipilih menempatkan masalah publik tersebut pada agenda kebijakan. Pada tahap ini, banyak masalah tidak disentuh sama sekali dan ada juga masalah yang ditunda untuk waktu yang lama.

2.2.2 Tahap Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*)

Pada tahap ini masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Menurut Dunn, dalam merumuskan kebijakan, para pejabat perlu melakukan prosedur *forecasting* untuk mengetahui konsekuensi kebijakan yang dipilih dimasa mendatang (Subandi, 2017). Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, oleh sebab itu yang bertanggungjawab atas proses formulasi kebijakan

harus melibatkan kelompok kepentingan, para administrator, politisi serta pimpinan organisasi. Namun untuk peranan dan siapa saja yang akan berpartisipasi dalam proses formulasi kebijakan pemerintah bergantung pada struktur politiknya.

Dalam praktik formulasi kebijakan pemerintah terdapat 3 (tiga) teori pengambilan keputusan yang dianggap paling sering dalam kepustakaan kebijakan pemerintah/publik, yaitu: (*Buku Teori Dan Analisis Kebijakan Publik, 2016*)

1. Teori Rasional Komprehensif

Teori pengambilan keputusan ini paling dikenal dan banyak diterima kalangan luas, memiliki unsur utama sebagai berikut:

- a. Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah lain;
- b. Tujuan, nilai atau sasaran yang memedomani pembuat keputusan amat jelas dan dapat ditetapkan rangkingnya sesuai dengan urutan kepentingan;
- c. Berbagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut diteliti secara seksama;
- d. Akibat-akibat (biaya dan manfaat) yang ditimbulkan oleh setiap alternatif yang dipilih harus diteliti;
- e. Setiap alternatif dan masing-masing akibat yang menyertainya dapat diperbandingkan dengan alternatif lainnya;

2. Teori Inkremental

Suatu teori pengambilan keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan dan merupakan teori yang lebih banyak menggambarkan cara yang ditempuh oleh pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan sehari-hari, pokok-pokok dari teori ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemilihan tujuan/sasaran dan analisis tindakan empiris yang diperlukan untuk mencapainya harus saling terkait;
- b. Pembuat keputusan dianggap hanya mempertimbangkan beberapa alternatif yang langsung berhubungan dengan pokok masalah dan alternatif tersebut dipandang berbeda secara marginal jika dibandingkan dengan kebijakan yang ada sekarang;

- c. Masalah yang dihadapi oleh pembuat keputusan akan didefinisikan secara teratur, sehingga dapat diantisipasi dampak dari masalah yang timbul untuk dapat ditanggulangi;
- d. Bagi setiap alternatif hanya sejumlah kecil akibat-akibat yang mendasar saja yang akan dievaluasi;
- e. Pembuatan keputusan yang inkremental pada hakikatnya bersifat perbaikan kecil dan hal ini lebih diarahkan untuk memperbaiki ketidaksempurnaan dari upaya konkret dalam mengatasi masalah sosial;

3. Teori Pengamatan Terpadu (*Mixed Scanning Theory*)

Teori ini memanfaatkan kedua teori sebelumnya yaitu teori rasional komprehensif dan teori inkremental yang disesuaikan dengan situasi yang berbeda-beda. Teori pengamatan terpadu juga memperhitungkan tingkat kemampuan para pembuat keputusan untuk memobilisasikan kekuasaannya guna mengimplementasikan keputusan-keputusan mereka, semakin besar keputusan untuk melakukan pengamatan semakin efektif untuk pengambilan keputusan tersebut. Oleh karena itu model pengamatan terpadu merupakan pendekatan kompromi dari kedua model sebelumnya.

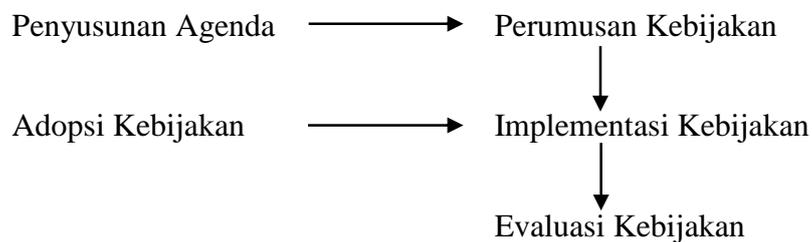
2.2.3. Tahap Adopsi Kebijakan

Adopsi kebijakan merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan para pelaku yang terlibat atau pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Tahap ini dilakukan setelah melalui proses rekomendasi dengan langkah-langkah sebagai berikut (Wisakti, 2008):

1. Mengidentifikasi alternatif kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diharapkan dan merupakan langkah terbaik dalam upaya mencapai tujuan tertentu untuk kemajuan masyarakat luas;
2. Pengidentifikasian kriteria-kriteria tertentu dan terpilih untuk menilai alternatif yang direkomendasikan;

3. Mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan agar efek positif alternatif kebijakan lebih besar ketimbang efek negatif yang akan terjadi:

Adopsi kebijakan ini akan direkomendasikan dalam implementasi kebijakan, oleh karena itu kedua tahap tersebut (penyusunan agenda dan adopsi kebijakan) biasanya diintegrasikan kedalam tahap-tahap perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan. Berdasarkan uraian diatas, tahap kebijakan publik digambarkan sebagai berikut:



Pada tahap adopsi kebijakan, untuk menentukan alternatif kebijakan yang dipilih melalui dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

2.2.4. Tahap Implementasi Kebijakan

Menurut Edwards III suatu implementasi kebijakan adalah keadaan pembuatan kebijakan antara penetapan kebijakan dan konsekuensi dari kebijakan tersebut bagi orang-orang yang dipengaruhi . Sedangkan Grindle mengemukakan bahwa *“implementation is a general process of administrative action that can be investigated at specific program level”*. (Tachjan, 2006)

Implementasi merupakan aktivitas guna menyelesaikan suatu pekerjaan dengan menggunakan sarana untuk memperoleh hasil yang diinginkan, apabila implementasi dikaitkan dengan kebijakan publik maka dapat diartikan sebagai pelaksanaan kebijakan publik yang telah disetujui dengan menggunakan sarana untuk mencapai tujuan kebijakan. Dari uraian diatas menggambarkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses tindakan administratif yang dilakukan secara *top-down* setelah adanya penetapan kebijakan, proses administratif dilakukan oleh unit-unit pada setiap level pemerintahan dan harus sejalan dengan tipe kebijakan yang telah dipilih.

Selanjutnya menurut Dunn tindakan implementasi kebijakan dibagi menjadi "*Policy inputs and policy process*". *Policy inputs* berupa masukan sumber daya, sedangkan *policy process* berkaitan dengan kegiatan administratif, organisasional yang membentuk transformasi masukan kebijakan kedalam hasil-hasil (*outputs*) dan dampak (*impact*) kebijakan. (Wisakti, 2010) Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi dan tujuan implementasi untuk membentuk hubungan yang memungkinkan sasaran serta tujuan kebijakan dapat diwujudkan sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan maka dalam mengimplementasikan kebijakan harus menggunakan unsur-unsur dan kegiatan yang terarah.

2.2.4.1 Unsur-unsur Implementasi Kebijakan

Menurut Smith (1977) Unsur-unsur mutlak yang harus dimiliki dalam implementasi kebijakan adalah unsur pelaksana (*implementor*), program yang dilaksanakan dan adanya kelompok target.

a. Unsur Pelaksana

Pihak yang berkewajiban menjalankan kebijakan public adalah unit-unit birokratik, seperti yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin (1986) "Unit-unit birokratik ini dominan dalam implementasi program dan kebijakan. Adapun dalam perumusan dan legitimasi kebijakan dan program walaupun mempunyai peran luas akan tetapi tidak dominan". Dalam implementasi kebijakan, unsur pelaksana memiliki diskresi mengenai instrument apa yang paling tepat untuk digunakan. Dengan demikian penilaian yang merupakan langkah terakhir dalam sebuah proses administrasi dan sebagai fungsi organik manajemen, merupakan salah satu upaya pengukuran serta perbandingan dari hasil pekerjaan yang dicapai secara nyata dengan hasil yang seharusnya. Kemudian yang menjadi objek dalam penilaian tersebut adalah seluruh kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan dengan meliputi:

1. Hasil yang dicapai dalam satu kurun waktu tertentu;
2. Biaya yang sudah dikeluarkan oleh suatu organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan;

3. Tenaga yang diperlukan;
4. Sarana dan prasarana yang dimanfaatkan, termasuk cara pemanfaatannya;
5. Efektivitas mekanisme dan prosedur kerja yang ditetapkan;

b. Program yang dilaksanakan

Agar dapat di implementasikan maka sebuah kebijakan administratif yang berupa pernyataan tentang tujuan, sasaran, serta sarana yang digunakan harus dijabarkan lagi menjadi sebuah program yang bersifat operasional, oleh karena itu pada hakikatnya bahwa implementasi kebijakan adalah implementasi program. Program tidak hanya berisikan tentang sasaran yang akan dicapai oleh pemerintah tetapi menjelaskan secara detail tentang alokasi sumber daya yang dibutuhkan, cara dan prosedur kerja yang digunakan serta kejelasan batas-batas sebagai acuan.

Secara logika setelah identifikasi masalah dan pemilihan alternative yang paling rasional untuk diajukan sebagai kebijakan puncaknya, lalu dijabarkan dalam rencana sehingga tahapan implementasi akan meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendesain program yang berisi rumusan tugas yang jelas, kriteria prestasi kerja, waktu dan biaya.
2. Mengaplikasikan program dengan memberdayakan struktur dan personalia, pendanaan, prosedur dan metode yang tepat
3. Menggunakan sistem penjadwalan, monitoring dan sarana pengawasan yang tepat guna dan mengevaluasi hasil pelaksanaan program.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk mengukur sebuah kualitas suatu program dapat dilakukan dari aspek isi dan aspek strukturnya. Isi program menjelaskan bobot pekerjaan serta sumberdaya sedangkan aspek struktur program menjelaskan permasalahan yang akan diselesaikan.

c. Kelompok sasaran

Kelompok sasaran adalah sekelompok orang ataupun organisasi yang akan mendapatkan jasa atau barang yang akan dipengaruhi perilakunya oleh sebuah kebijakan. karakteristik yang dimiliki oleh kelompok sasaran seperti besaran kelompok sasaran, jenis kelamin, pengalaman, usia, tingkat pendidikan serta keadaan sosial ekonomi berpengaruh pada efektivitas implementasi. Pengaruh tersebut bisa terjadi karena faktor lingkungan tempat tinggal, baik lingkungan sosial budaya maupun lingkungan geografis.

Selain itu faktor komunikasi juga berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga buruknya komunikasi ini menjadi kelemahan untuk mencapai efektifitas kebijakan. Oleh karena itu perluasan isi kebijakan melalui komunikasi yang baik akan berpengaruh juga terhadap efektivitas implementasi kebijakan, untuk itu dibutuhkan peran media komunikasi dalam hal menyebarluaskan isi kebijakan.

2.2.5 Tahap Evaluasi Kebijakan

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai terhadap kebijakan yang sudah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan bukan hanya untuk mendapatkan kesimpulan dari kebijakan yang sudah dilaksanakan, melainkan juga saran dan kritik untuk merumuskan kembali masalah tersebut. Dalam melakukan evaluasi kebijakan publik secara umum terdapat 3 (tiga) tipologi evaluasi, yaitu: (Subandi, 2017)

- a. Evaluasi proses, dilakukan dengan cara memusatkan perhatian pada pertanyaan bagaimana program dilaksanakan;
- b. Evaluasi dampak, dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah dicapai dari program;
- c. Evaluasi strategi, bertujuan untuk memecahkan masalah masyarakat dibandingkan dengan program lain ditujukan pada masalah yang sama sesuai dengan topik mengenai kebijakan publik;

William Dunn mengemukakan bahwa persoalan yang terjadi sehubungan dengan evaluasi adalah membedakan fungsi antara monitoring atau evaluasi dalam proses pelaksanaan dengan evaluasi kinerja atau evaluasi setelah pelaksanaan. (*Buku Teori Dan Analisis Kebijakan Publik, 2016*) Diantara kedua hal tersebut memiliki dua fungsi yang berbeda dalam hal informasi yang dihasilkan. Monitoring dapat menghasilkan informasi yang bersifat empirik yang didasarkan pada fakta, sedangkan evaluasi menghasilkan informasi yang bersifat penilaian dalam memenuhi kebutuhan, peluang atau memecahkan permasalahan.

2.3. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik

2.3.1 Model Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan suatu cara agar mencapai tujuan sebuah kebijakan, untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan terdapat dua langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui turunan kebijakan tersebut. Keberhasilan dalam tahap implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor, masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Maka dari itu untuk mengetahui faktor yang terkait dalam implementasi kebijakan, ada beberapa model implementasi kebijakan yang digunakan dalam berbagai penelitian antara lain: (*Buku Teori Dan Analisis Kebijakan Publik, 2016*)

2.3.1.1 Model Implementasi Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Model yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier disebut “*a frame work for implementation analysis*” bahwa yang menjadi peran penting dalam analisis implementasi kebijakan adalah mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Ada 3 (tiga) variabel yang mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan, antara lain: (*Buku Teori Dan Analisis Kebijakan Publik, 2016*)

- a. Karakteristik dari masalah
 1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang dialami. Di satu sisi ada beberapa masalah sosial yang secara teknis mudah diselesaikan, tapi disisi lain terdapat masalah sosial yang sulit diselesaikan.

2. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Suatu kebijakan akan sulit diimplementasikan apabila kelompok sasarannya heterogen karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran relatif berbeda terhadap kebijakan.
3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Implementasi kebijakan akan mudah apabila jumlah kelompok sasaran tidak terlalu besar.
4. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Kebijakan yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat akan lebih sulit diimplementasikan, sebaliknya jika sebuah kebijakan bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif maka akan mudah diimplementasikan.

b. Karakteristik kebijakan

1. Kejelasan isi kebijakan. Semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan maka akan mempermudah para implementor untuk dapat memahami dan menerjemahkan dalam aksi nyata.
2. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis akan lebih mudah untuk diimplementasikan karena sudah teruji, meskipun ada beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada perubahan.
3. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut.
4. Seberapa besar adanya keterkaitan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan kebijakan sering disebabkan kurangnya komunikasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
5. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana, serta seberapa besar komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
6. Seberapa besar akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

c. Variabel lingkungan

1. Kondisi sosial ekonomi dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terdidik dan terbuka dengan kemajuan teknologi, akan lebih mudah untuk menerima sebuah pembaruan kebijakan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional.
2. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya akan lebih mudah mendapat dukungan publik, sebaliknya kebijakan disinsentif akan sulit mendapat dukungan dari publik.
3. Sikap dari kelompok pemilih. Kelompok pemilih dapat memengaruhi suatu kebijakan dengan cara melakukan intervensi keputusan yang dibuat oleh badan pelaksana melalui berbagai opini dengan maksud merubah keputusan.
4. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. Aparat pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan yang terdapat dalam sebuah kebijakan agar selanjutnya dapat merealisasikan tujuan tersebut.

2.3.1.2 Model Implementasi George C. Edward III

Menurut Edward III keberhasilan suatu implementasi kebijakan ditentukan oleh empat variabel, yakni: (Fanani, 2022)

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi memfokuskan pada implementor agar mengetahui apa yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga mampu mengurangi distorsi implementasi. Komunikasi adalah sebuah proses terjadinya interaksi dalam menyampaikan sebuah pesan kepada mediator, komunikasi berpengaruh terhadap implementasi terletak pada kejelasan serta inti pesan yang dapat dipahami secara utuh oleh si

penerima pesan. Dalam proses komunikasi kebijakan, ada 3 hal yang menjadi utama menurut Edward, sebagai berikut:

1. Transmisi : Informasi yang tidak hanya disampaikan kepada implementor kebijakan tetapi juga pada pihak
2. Konsistensi : Informasi yang disampaikan harus konsisten dari awal penyampaian agar implementor dapat menjalankan tugas.
3. Kejelasan : Informasi yang disampaikan harus mudah dipahami dan dijelaskan dengan rinci agar tidak terjadi kesalahan interpretasi antara implementor dan masyarakat.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan meskipun isi sebuah kebijakan sudah dikomunikasikan tetapi implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu diperlukan sumber daya yang berkualitas dan mampu melaksanakan program pengelolaan dana desa dengan baik, tidak hanya sumber daya manusia yang dibutuhkan tetapi juga sumber daya lainnya seperti informasi, wewenang dan fasilitas.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik implementor, jika implementor memiliki sikap atau pandangan yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi juga tidak berjalan efektif. Ada 3 kemungkinan sikap yang dimiliki seorang implementor yaitu pertama mau menjalankan program kebijakan, kedua menolak program kebijakan secara terang-terang bahkan bersembunyi dan ketiga bersikap netral dalam arti ikut melaksanakan program apabila bermanfaat. Dedikasi dan komitmen dari para pelaksana kebijakan ditunjukkan melalui sikap dan ketanggapannya dalam menjalankan sebuah program.

d. Struktur birokrasi

Salah satu aspek yang penting dalam struktur birokrasi adalah adanya standar prosedur operasi (*standart operating procedures*) yang sesuai. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam melaksanakan tugas.

Struktur birokrasi merupakan susunan organisasi dalam ruang lingkup birokrasi, aspek yang terdapat dalam struktur birokrasi mencakup kewenangan dan hubungan antar unit. Struktur birokrasi memiliki 2 karakteristik yaitu standar operasional prosedur atau standar operasional pegawai yang berarti tuntutan internal akan kepastian waktu dan fragmentasi (penyebaran tanggung jawab).

2.3.1.3 Model Implementasi Merilee S. Grindle

Menurut Grindle keberhasilan sebuah implementasi ditentukan oleh dua variabel yaitu variabel isi kebijakan dan variabel lingkungan. Yang mencakup variabel isi kebijakan adalah: (Aras, 2018)

- a. Sejauh mana kepentingan kelompok termuat dalam isi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauh mana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya;
- b. Jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran. Variabel ini menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus memberikan manfaat yang menunjukkan dampak positif yang di hasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakn;
- c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari kebijakan tersebut. Seberapa besar perubahan yang ingin dicapai
- d. Apakah isi kebijakan telah menyebutkan implementor dengan rinci;
- e. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai;

Sedangkan yang mencakup variabel lingkungan adalah :

- a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor. Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Jika hal ini tidak diperhitungkan secara rinci, besar kemungkinan program yang hendak di implementasikan tidak tepat sasaran;
- b. Karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa. Dalam melaksanakan kebijakan perlu melihat lingkungan sekitarnya karena akan berpengaruh terhadap keberhasilan, maka pada bagian ini harus menjelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan;
- c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Pada poin ini menjelaskan sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan;

2.3.2. Aktor Implementasi Kebijakan

Untuk mencapai keberhasilan dari implementasi kebijakan, maka peran dari aktor dalam melaksanakan kebijakan tersebut sangat berpengaruh. Menurut Winarno ada lima implementor dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu: (Subandi, 2017)

a. Birokrasi

Pada umumnya kebijakan publik diimplementasikan oleh sistem badan administrasi yang kompleks. Badan administrasi ini melaksanakan tugas pemerintah sehari-hari dan dapat mempengaruhi masyarakat melalui tindakan-tindakannya.

b. Lembaga Legislatif

Selain sebagai pembuat undang-undang lembaga legislatif juga turut dalam implementasi kebijakan tersebut.

c. Lembaga Peradilan

Keterlibatan lembaga peradilan adalah dalam konteks mempengaruhi tata kelola atau administrasi melalui interpretasinya terhadap perundang-undangan dan peraturan administratif serta regulasi,

pengkajian ulang terhadap keputusan administratif dalam kasus yang dibawa ke pengadilan.

d. Kelompok-kelompok Penekan

Kelompok penekan akan berusaha untuk mempengaruhi peraturan agar dapat memberikan keuntungan kepada mereka.

e. Organisasi Masyarakat

Organisasi masyarakat menjadi aktor dalam implementasi kebijakan karena mereka terlibat dalam pelaksanaan program-program untuk publik.

2.3.3. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, tentu ada beberapa faktor pendukung ataupun faktor yang menghambat dalam mengimplementasikan kebijakan publik, pada penelitian ini penulis merujuk pada pemikiran Merilee S. Grindle. Ada dua variabel yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, yaitu *content of policy* dan *context of policy*: (Aziz, 2019)

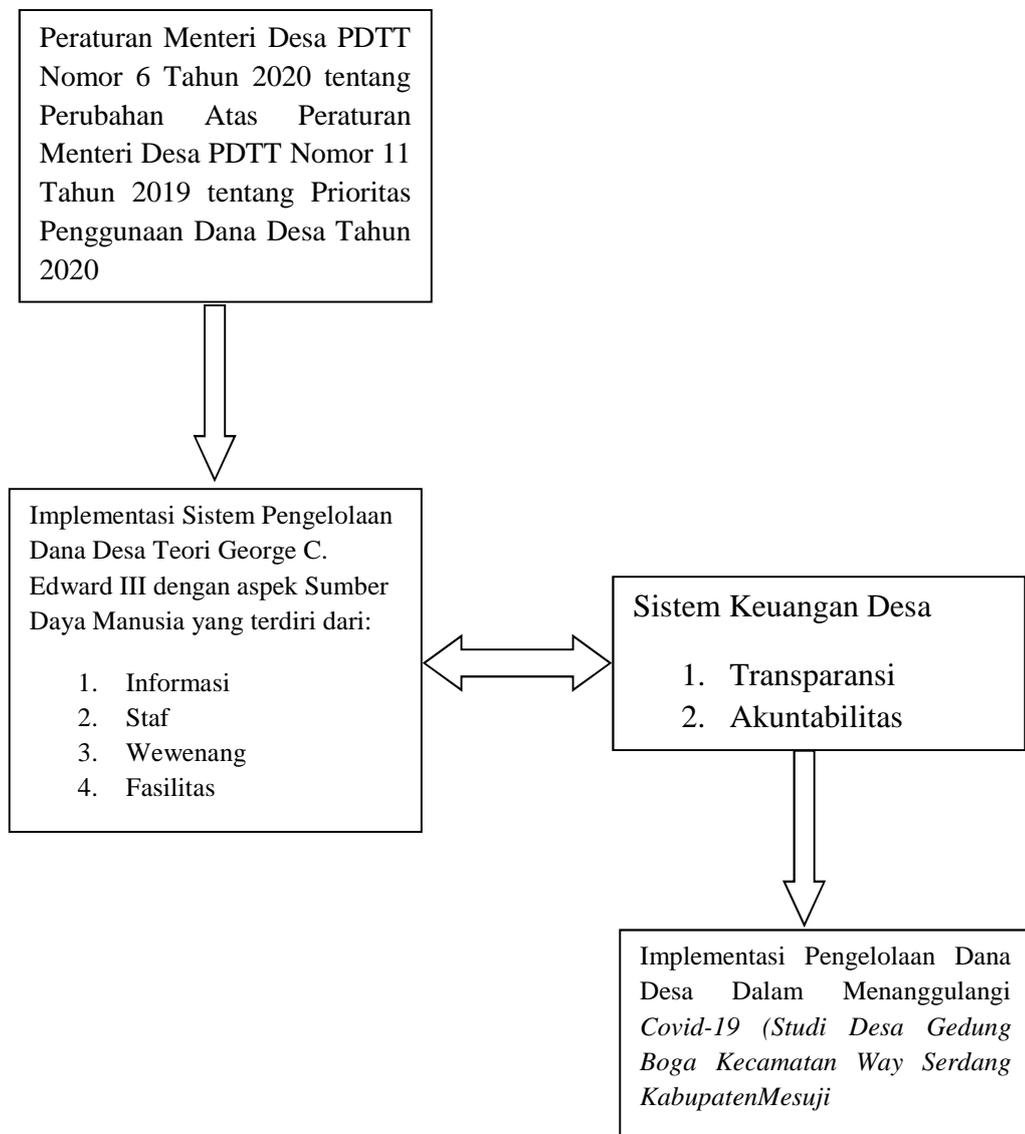
1. *Content Of Policy* terdiri dari enam poin yaitu:
 - a. Kepentingan yang mempengaruhi. Berkaitan dengan kepentingan indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauhmana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.
 - b. Jenis manfaat yang diperoleh. Poin ini menunjukkan bahwa suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh adanya implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan.
 - c. Derajat perubahan yang ingin dicapai. Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dicapai oleh karena itu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

- d. Letak pengambilan keputusan. Dalam suatu kebijakan, pengambilan keputusan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Pada poin ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan di implementasikan.
- e. Pelaksana program. Untuk menjalankan suatu kebijakan harus didukung dengan pelaksana yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan implementasi kebijakan.
- f. Sumber daya yang digunakan. Keberhasilan proses implementasi sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi, karena keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang di isyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya itu tidak ada, maka inerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

2. *Context Of Policy* terdiri dari tiga poin yaitu:

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. Hal ini perlu diperhitungkan secara matang agar memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan publik.
- b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada poin ini dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
- c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Pada poin ini harus menjelaskan sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.
- d.

2.3.4 KERANGKA PIKIR



Sumber: *diolah peneliti, 2023.*

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan pengalihan dana desa di Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji sebagai upaya menangani pandemi *covid-19* tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Sugiyono (2011:13) bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011:4) metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode survey untuk mengungkap tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan pengalihan dana desa dalam menangani pandemi *covid-19* dengan memahami dan memaknai pandangan serta kejadian pada subjek penelitian dalam rangka meneliti secara mendalam mengenai kebijakan pengalihan dana desa untuk *covid-19* di Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif yaitu apa yang menjadi sasaran peneliti dalam penelitiannya. Tanpa adanya fokus penelitian, maka peneliti akan mudah terjebak oleh melimpahnya data yang diperoleh di lapangan. Moleong (2011:97), fokus adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau pengetahuan yang di peroleh melalui kepustakaan ilmiah maupun kepustakaan lainnya. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan masalah yang akan dipecahkan.

Untuk menilai keberhasilan suatu implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang dalam upaya menangani pandemi *covid-19*, ditentukan oleh empat variabel menurut Edward III yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur birokrasi. Peneliti lebih memfokuskan pada variabel sumber daya manusia karena kemampuan pelaksana pemerintah desa gedung boga sudah cukup baik dan mampu memajemen program prioritas dana desa sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial antar masyarakat

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu wilayah yang akan menjadi tujuan penelitian. Moleong (2011:128) cara terbaik yang perlu di tempuh dalam menentukan lokasi penelitian adalah dengan cara mempertimbangkan teori substantif dan mempelajari rumusan masalah serta mendalami fokus penelitian. Adapun yang menjadi lokasi penelitian dalam pembuatan tesis ini adalah Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang karena seperti yang peneliti ketahui bahwa desa ini termasuk penerima dana desa cukup besar dibanding dengan desa-desa lainnya dari pemerintah pusat dan merupakan salah satu desa percontohan di Kecamatan Way Serdang bagi 19 desa lainnya termasuk dalam hal pengelolaan dana desa.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Ada dua jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui pengamatan sendiri maupun melalui daftar pertanyaan. Selama proses pengumpulan data, penulis menggunakan teknik penentuan sampel dengan melakukan wawancara sebagai berikut:

Tabel 1

Nama	Jabatan
Yulida Sriwahyuni	Kepala Desa
Imam Komari	Sekretaris Desa
Lindawati	Kaur Keuangan
Redi Utomo	Staf bidang PMD Kecamatan Way Serdang

Penulis juga melakukan observasi ke Desa Gedung Boga serta lingkungan masyarakat Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kab. Mesuji.

- b. Data Sekunder diperlukan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari sumber data primer. Penulis melihat beberapa dokumen seperti laporan realisasi penggunaan dana desa di Desa Gedung Boga, kemudian penulis menggunakan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Selanjutnya penulis juga menggunakan literatur buku-buku dengan tema kebijakan publik.

3.4.2. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2011:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal ini, jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Langkah awal untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini adalah dengan menentukan terlebih dahulu informan penelitian.

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *purposive* (disengaja) dan bersifat tidak acak serta dipilih berdasarkan kepentingan tertentu.

3.5. Teknik Analisis Data

Kegiatan berikutnya setelah terkumpulnya data adalah menganalisis data. Menurut Bogdan dan Biklen analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif, tahapan-tahapan analisis data meliputi antara lain:

3.5.1 Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap. Laporan lapangan selanjutnya direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung dan peneliti dapat menyederhanakan data dalam bentuk ringkasan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pemilihan data yang telah didapat dan memfokuskan berdasarkan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang.

3.5.2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data diwujudkan dalam bentuk tabel, grafik, foto atau gambar dan sejenisnya. Akan tetapi paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks naratif.

3.5.3 Penarikan Kesimpulan

Melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat “*grounded*”.

3.6. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh, penelitian kualitatif menghadapi persoalan penting mengenai pengujian keabsahan data. Untuk itu perlu dibangun sebuah mekanisme untuk mengatasi keraguan terhadap hasil penelitian kualitatif. Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria.

3.6.1 Triangulasi

Teknik ini memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Ada tiga macam triangulasi yaitu triangulasi sumber, penyidik dan teori. Triangulasi sumber, berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi penyidik, dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain. Triangulasi teori, dilakukan secara induktif atau secara logika.

3.6.2. Kebergantungan

Uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan penelitian, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability* nya.

3.6.3. Kepastian Data

Menguji kepastian (*confirmability*) berarti menguji hasil penelitian, di kaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. Pemeriksaan yang di lakukan oleh pembimbing menyangkut kepastian asal-usul data, logika penarikan kesimpulan dari data dan penilaian derajat ketelitian serta telaah tentang keabsahan data.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah di paparkan di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa keputusan untuk alokasi dana desa 2020 di prioritaskan untuk menangani *covid-19*. Prioritas pada tahun 2020 difokuskan pada 3 program yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 yaitu Program Desa Lawan *Covid-19*, Program Padat Karya Tunai Desa dan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Program yang sudah dilaksanakan oleh desa meliputi sosialisasi dan pembagian masker, penyemprotan desinfektan pada fasilitas umum, pembentukan posko desa, pemberlakuan jaga malam diposko dan penyaluran BLT dana desa.

Untuk program padat karya tunai desa sementara tidak dijalankan karena bantuan untuk masyarakat sudah cukup membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam penanggulangan *covid-19*. Implementasi kebijakan dana desa di desa gedung boga dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan teori keberhasilan implementasi yang dikemukakan oleh Edward III yang terdapat dalam empat variable diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Peneliti memfokuskan pada aspek sumber daya manusia dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Dari hasil penelitian yang sudah di jelaskan pada bab sebelumnya jika dilihat dari variable komunikasi pada pemerintah desa sudah efektif, dapat dilihat dari adanya sosialisasi baik secara lisan maupun tulisan kepada masyarakat mengenai *covid 19* dan himbauan terkait protokol kesehatan. Masyarakat juga sudah mematuhi protokol kesehatan sesuai himbauan pemerintah desa.

Dilihat dari sumber daya dapat di kategorikan dalam 2 hal yaitu sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Dilihat dari sumber daya manusia tingkat kemampuan pelaksana sangat baik karena pemerintah desa mampu memanajemen dan mengimplementasikan program desa lawan *covid-19* dan program BLT dana desa dengan rata dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Kemudian dalam hal wewenang, kepala desa mengelola dana desa secara swakelola dengan memanfaatkan sumber daya manusia di desa tersebut. Sumber daya anggaran yang disediakan sudah cukup untuk membiayai program dengan rincian pembelian masker, cairan desinfektan, laser thermometer, *handsanitizer*, baju APD, kran gallon, dan BLT dana desa dan belanja perlengkapan lainnya.

5.2 SARAN

Pemerintah perlu mengadakan pelatihan atau asistensi tentang peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan desa dengan tujuan meningkatkan kemampuan kolektif aparatur desa yang melibatkan berbagai pihak misalnya lembaga swadaya masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, perguruan tinggi dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdoellah, Awan. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Moleong, Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia

Peraturan :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Jurnal :

Ade Purnawan, Nurbudiwati, Rizky Bangga Prayuda, Adji Abdul Wahid. (2023). Analisis Keberhasilan Implementasi Kebijakan Prioritas Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. 10 (1), 139-146.

Adila Nur Azizah, Indah Prabawati. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Sukowidodo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Publika*. 9 (4), 459-472.

Endang Gury dan Rahmi Hayati. (2020). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dilihat Dari Aspek Sumber Daya Di Desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Bartim. *Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*. 2 (3), 893-902.

Fanani dkk. (2022) Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Menanggulangi Dampak Covid-19 di Kabupaten Ngawi. *Journal of Governance Innovation*, 4 (1), 46-63.

Handayani dkk. (2020). Penyakit Virus Corona 2019. *Official Journal Of The Indonesian Society Of Respiriology*, 40 (2), 120-126.

Hidayat, E. (2020). Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Sampang. *Soetomo Communication and Humanities*. 1. 126-136.

Indrianti, Lukman Hakim, Kariena Febriantini. (2022). Implementasi Kebijakan Dana Desa Situndam Untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9 (4), 1057-1062.

Lukito, Cahyo. (2018). Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. 2 (1). 36-40.

Novianty dkk. (2020). Praktik Penganggaran Dan Penyaluran Bantuan Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Desa Sariwangi Kabupaten Bandung Barat). *Prosiding Senantias*, 1 (1). 1583-1591.

Nurahmawati dkk. (2020). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Warga Terdampak Covid-19 di Desa Cibadak. *Jurnal Program Mahasiswa Kreatif*, 4 (2), 160-165.

Nurnazmi Laelah, Rahmad Hidayat, Rudyk Nababan. (2022). Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Covid-19 Pada Tahun 2020 di Desa Randusari Kabupaten Brebes. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*. 6 (2), 401-407.

Sulistyowati, S., Citra Y.N., dan Fitriyah, E. (2019) Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Studi Kasus pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. *International Journal of Social Science and Business*. 3 (3). 299-305.

Susilo dkk. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatus Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7 (1), 45-63.

Sumber-Sumber Lainnya :

Aras, A. 2018. *Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Mamuju Tengah*. FISIP: Universitas Hasanudin.

Aziz, Muhammad. 2019. *Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang*. FISIP: Universitas Sriwijaya.

Wisakti, Daru. 2008. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan*. FISIP: Universitas Diponegoro.